

AFFIRMATIVE ACTION: STUDI TENTANG KETERLIBATAN PEREMPUAN DALAM PARTAI GOLONGAN KARYA DI KABUPATEN MAGETAN

Frederik Fernandez¹, Darsono², Utami Sulistyani³

¹Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, Indonesia

²Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, Indonesia

³Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, Indonesia

Frederik@uwks.ac.id, darsono_fbs@uwks.ac.id, utamisulistyani24@gmail.com

DOI: <http://dx.doi.org/10.30742/juispol.v2i2.2573>

Abstrak

Kajian ini bertujuan untuk mendeskripsikan prinsip-prinsip keadilan yang diterapkan terhadap perempuan dalam aktivitas politik. Mendeskripsikan juga proses kaderisasi perempuan untuk terlibat aktif dalam kegiatan politik melalui pelatihan kepemimpinan. Juga mengamati secara mendalam keberpihakan kepada perempuan dalam *affirmative action* secara kelembagaan. Mendeskripsikan berbagai pengalaman konkrit yang dialami perempuan dalam aktivitas politiknya serta apa yang sudah dilakukan partai dalam mempersiapkan kader perempuan di DPD Partai Golkar Kabupaten Magetan. Menggunakan metode deskriptif-kualitatif, kajian ini menemukan adanya dinamika aktif perempuan dalam kepengurusan Partai Golkar Kabupaten Magetan, Provinsi Jawa Timur. Walaupun ditemukan berbagai hambatan yang dialami oleh kader-kader perempuan dalam berpartisipasi, namun Partai Golkar sebagai organisasi yang matang siap mendidik kader-kader perempuannya agar berpartisipasi setara dengan kaum laki-laki. Demikian pun tidak ada perbedaan perlakuan dalam memberikan kesempatan berpendapat dan kedudukan dalam aktivitas organisasi Partai Golkar di Kabupaten Magetan, Jawa Timur.

Kata kunci: Affirmative action, Politik perempuan, Partai Golkar

Abstract

This study aims to describe the principles of justice applied to women in political activities. It also describes the process of cadre of women to be actively involved in political activities through leadership training. Also observe deeply the partiality of women in institutional affirmative action. Describe the various concrete experiences experienced by women in their political activities and what the party has done in preparing female cadres in the DPD Golkar Party, Kabupaten Magetan. Using the descriptive-qualitative method, this study found the active dynamics of women in the management of the Golkar Party in Kabupaten Magetan, East Java. Although there were various obstacles faced by female cadres in participating, the Golkar Party as a mature organization is ready to educate its female cadres to participate equally with men. Likewise, there is no difference in treatment in providing an opportunity for opinion and position in the activities of the Golkar Party organization in Kabupaten Magetan, East Java.

Keywords: Affirmative action, Women's politics, Golkar Party

A. Pendahuluan

Undang-Undang No. 10/2008 tentang Pemilihan Umum (Pemilu) dan UU No. 2/2011 tentang Perubahan UU No. 2/2008 tentang Partai Politik telah mengamanatkan untuk memastikan setidaknya 30% perempuan dicalonkan dalam daftar anggota parlemen. Atau dapat dikatakan bahwa dari 3 calon legislatif (Caleg) harus ada satu nama perempuan. Namun yang terjadi di lapangan jumlah porsi yang harusnya dimiliki perempuan sangat jauh dari kata ideal. Menurut data yang dimiliki *inter Parliamentary Union*, mengungkapkan bahwa keterwakilan perempuan Indonesia di parlemen berada pada peringkat keenam dibandingkan dengan negara-negara yang ada di Asean.

Perempuan juga sering menjadi sorotan di masyarakat karena adanya anggapan bahwa perempuan dipandang sebagai makhluk ke dua setelah laki-laki. Adanya budaya patriarki yang terjadi di dalam masyarakat adalah di mana budaya yang memosisikan kedudukan laki-laki lebih tinggi atau lebih mulia kedudukannya dari pada kedudukan yang dimiliki oleh perempuan. Meskipun sebagaimana yang telah ditetapkan pada UU No.2 Tahun 2008 dan UU No. 7 Tahun 2017 bahwa Indonesia sendiri telah mengakomodir peran perempuan di dalam pemerintahan dan politik namun belum dapat terlaksana secara maksimal.

Dalam *affirmative action* representasi perempuan tentang kuota gender memiliki berbagai macam tipe dan varian yang bisa diklarifikasi. Mona Lena Krook (2009) menjadikannya dalam tiga klasifikasi. Pertama, *Party quota*, yakni memberi akses pencalonan perempuan yang dilakukan partai politik dalam persentase tertentu di dalam daftar kandidatnya; kedua, *legislatif quota*, yakni memberikan akses dalam pencalonan bagi perempuan dalam persentase

tertentu hanya saja dimandatkan untuk seluruh partai politik yang berkontestasi melalui regulasi yang mengikat. Ketiga, *reserved seats*, yaitu suatu bentuk jaminan memperoleh kursi di parlemen dalam jumlah atau persentase tertentu bagi perempuan melalui regulasi pemilu. Dua jenis kuota gender yang pertama lebih mengintervensi proses memilih karena berada dalam ranah proses memilih, dengan menyediakan pilihan yang 'lebih' representatif. Sementara jenis yang terakhir lebih mengintervensi pada hasil agar parlemen dipastikan memiliki wakil yang 'lebih' representative (Dirga Ardi, 2021).

Pengalaman di Indonesia, laki-laki di dalam berpolitik berada jauh di depan dibandingkan dengan perempuan. Adapun ketidakadilan ini diciptakan secara sistematis dengan waktu yang sudah cukup lama. Sejarah mencatat bahwa hal tersebut menjadikan perempuan termarginalkan dan menjadi tidak memiliki pengalaman dalam berpolitik dalam berkontestasi. Kajian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana prinsip-prinsip keadilan diterapkan terhadap perempuan dalam aktivitas politik, kaderisasi perempuan untuk aktif dalam politik, keberpihakan kepada perempuan dalam *affirmative action* dan apa saja pengalaman konkret yang dialami perempuan dalam aktivitas politiknya serta apa yang sudah dilakukan partai dalam mempersiapkan kader perempuan di DPD Partai Golkar Kabupaten Magetan.

Demikian pula manfaat yang dapat diperoleh melalui kajian ini bagi pengembangan teori tentang feminisme, memperkaya perdebatan teoritis, atau menjadi sumber inspirasi penelitian lainnya. Secara lebih praktis diharapkan bermanfaat untuk kaum perempuan yang ada di dalam partai Golkar.

B. Kajian Pustaka

Untuk mengetahui *state of the arts* kajian ini, akan dikemukakan beberapa kajian tentang partisipasi perempuan di dalam dunia politik, khususnya di dalam partai politik, telah dilakukan beberapa penelitian terdahulu. Secara umum mengkaji tentang peran-peran perempuan yang ada di dalam partai politik seperti.

Shinta Kartika Sari (2022) Mengkaji tentang Keterwakilan Perempuan Kader PDI Perjuangan dalam pemilu legislatif 2019 di DPRD DKI Jakarta (dimuat dalam Jurnal Adhikari Vol 1. No. 3 Januari 2022). Hasil kajiannya menyimpulkan lima hal penting: 1) Representasi perempuan kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) dalam Pemilu Legislatif 2019 di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi DKI Jakarta, berperan cukup signifikan. 2) representasi perempuan sudah memenuhi kuota 30% keterwakilan perempuan dan sudah memenuhi persyaratan sesuai peraturan yang berlaku. 3) Kualitas politik perempuan kader PDI Perjuangan dalam Pemilu Legislatif 2019 yang telah terpilih di DPRD Provinsi DKI Jakarta, sebagian besar telah paham terhadap yang menjadi tugas, pokok, dan fungsinya (tupoksi) sebagai wakil rakyat. 4) Kualitasnya dapat dianggap sudah bagus dan terbukti bahwa sebelas orang kader PDI Perjuangan ini telah cukup aktif sebagai legislator di DPRD DKI Jakarta. 5). Proses kaderisasinya sudah sangat baik dan dapat dilaksanakan dengan baik oleh PDI Perjuangan.

Made Ananda Putri mengkaji tentang pengaruh *affirmative action* terhadap keterwakilan perempuan di DPRD Provinsi Bali (2020). Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum empiris. Hasil kajiannya menunjukkan bahwa pengaruh dari *affirmative action* terhadap keterwakilan perempuan di

legislatif di Provinsi Bali belum maksimal. Pemerintah, organisasi masyarakat, partai politik, dan masyarakat harus secara bersama-sama saling membantu di dalam men-sukseskan keterwakilan perempuan di legislatif di Provinsi Bali melalui sosialisasi yang lebih intens.

St. Habibah mengkaji tentang Partisipasi dan Peran Perempuan dalam Partai Politik (Jurnal Al-Maiyyah Vol.8 No.2 Juli-Desember 2015). Hasil dari analisisnya ialah partisipasi perempuan di dalam partai politik sangat tinggi baik di dalam kepengurusan, pertemuan organisasi, pemberian suara, kampanye, diskusi-diskusi politik dan rapat-rapat umum yang selama ini telah banyak dilakukan oleh partai-partai politik yang ada. Akan tetapi permasalahan yang lebih dasar pada politik perempuan ini adalah dimana ketidakadilan yang lahir akibat adanya kesenjangan yang terjadi antara hak politik perempuan dan peran serta posisi politik dengan hak politik dan peran politik laki-laki. Adapun peran perempuan dalam partai politik yaitu di mana selama ini perempuan ditempatkan hanya sebatas sebagai anggota dalam hal kepengurusan partai politik.

Sedangkan posisi perempuan dalam partai politik rata-rata bersifat *stereotype*, hal ini dapat dibuktikan dari hasil penelitian melalui wawancara dengan alasan bahwa dengan tidak banyak dilibatkan dalam faktor-faktor yang mempengaruhi keterlibatan perempuan dalam partai politik baik itu di Golkar, PPP, maupun PDIP. Sehingga terkesan bahwasannya selama ini banyak perempuan yang tidak mau terlibat dengan persoalan partai, dan sering terjadi tindakan diskriminasi.

Very Wahyudi mengkaji tentang Peran Politik Perempuan dalam Perspektif Gender yang dipublikasikan oleh Jurnal Politik Islam Vol. 1 No. 1 (Jan-Jun) 2018, hlm. 63-83.

Hasil penelitian di Indonesia sejak terjadinya reformasi, partisipasi politik perempuan dalam pengambilan keputusan dan legislatif. Berbagai kebijakan afirmasi dan penguatan terus diupayakan. Dalam demokrasi inklusif, masyarakat sebagai salah satu pilar yang dapat dikatakan penting. Karena keberadaan mereka dapat menjadikan kesejahteraan kelompok perempuan di dalam politik menjadi meningkat. Akan tetapi di dalam praktiknya representasi dalam politik perempuan yang ada di perlementer masih dapat dikatakan jauh dari kuota target 30%.

Akan tetapi tidak dapat dipungkiri, di dalam konteks Indonesia mengenai persoalan keterwakilan perempuan di dalam parlemen masih menghadapi tantangan baik secara internal ataupun eksternal. Seharusnya sebagai warga negara seluruh hak kaum perempuan sudah dijamin di dalam konstitusi, termasuk hak untuk berpartisipasi di bidang politik. Adapun kendala-kendala yang terjadi antara lain berupa masalah internal seperti masih lemahnya kualitas dari sumber daya manusia yang sebagian besar kaum perempuan, adanya keterbatasan jumlah perempuan yang memiliki kualitas dan kualifikasi mumpuni di dalam bidang politik, serta adanya rasa kurang percaya diri untuk bersaing dengan kaum laki-laki. Sedangkan kendala-kendala yang terjadi di dalam eksternal ialah pada kultur masyarakat Indonesia yang patriarki, ketiadaan kemauan politik elit partai yang enggan membuka ruang yang luas bagi keterlibatan kaum perempuan, dan sikap sebagian kaum laki-laki yang sering meremehkan kemampuan para kaum perempuan di dalam bidang politik.

Kendala-kendala yang akan dihadapi seperti ideologis dan psikologis yang terjadi diparlemen di antaranya; pertama, masih adanya ideologi gender dan pola-pola kultural maupun peran sosial yang

ditetapkan sebelumnya diberikan kepada laki-laki dan perempuan. Kedua, kurang percayanya perempuan ketika mencalonkan diri. Rasa ketakutan ini yang membuat perempuan tidak ingin berkompetisi dalam pemilihan maupun berpartisipasi dalam kehidupan politik.

Harus diakui bahwa parpol yang ada di Indonesia belum bersikap lapang dada dan maksimal dalam tindakan afirmasi peningkatan keterwakilan perempuan di lembaga legislatif. Adanya perbaikan mendasar yang seharusnya diberikan melalui perangkat regulasi kepada parpol sehingga mereka dapat lebih menghargai afirmasi perempuan dalam lembaga legislatif. Adapun usaha dalam meningkatkan perempuan di dalam parlemen hasil pemilu 2014 sejauh ini dapat dikatakan berhasil. UU Nomor 8 Tahun 2012 dan PKPU Nomor 7 Tahun 2013 berhasil memaksa partai politik untuk memenuhi kuota yang sudah direncanakan yaitu 30 persen keterwakilan perempuan. Dari jumlah caleg perempuan didaftar calon tetap DPR periode 2014-2019 mencerminkan bahwa target tersebut dapat dikatakan memenuhi kuota.

Adapula tantangan yang harus dihadapi oleh caleg perempuan seperti contohnya modal politik, modal sosial, dan modal ekonomi. Akan tetapi yang menjadi kendala dimana mengenai persoalan tentang ideologis dan psikologis, seperti masih adanya pola kultural sosial yang bersifat tradisional, ideology gender, dan kurangnya pengalaman di dalam partai politik.

Yogi Maulana Malik menganalisis tentang Peran Perempuan Dalam Partai Politik di Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPC PDI P) Kota Cirebon (2016). Berdasarkan dari hasil penelitian yang dilakukan menyimpulkan bahwa: Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan secara umum sangat berpihak kepada perempuan sesuai dengan visi dan

Misi Partai. Dijelaskan bahwa tidak adanya perbedaan diantara kaum perempuan dan laki-laki. Keseriusan dalam menangani masalah perempuan, PDIP membentuk suatu badan khusus untuk mendengar aspirasi dan mengurus masalah perempuan yaitu badan yang diberi nama pemberdayaan perempuan di dalam struktur organisasinya. Sebagai respon kebijakan afirmatif, DPP telah mengeluarkan surat keputusan yang berisikan tentang seluruh proses penjangkaran, penyaringan dan penetapan yang dilakukan oleh struktur partai pada tingkatannya dalam melakukan penjangkaran dan penyaringan caleg DPRD Kabupaten maupun Kota, DPRD Provinsi, dan DPR RI dilakukan dengan memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh perseratus). Adanya hal ini menunjukkan bahwa Demokrasi Indonesia Perjuangan melindungi hak-hak politik dari seluruh warga tanpa terkecuali laki-laki maupun perempuan. c) Adapun tata cara pencalonan dari anggota legislatif dimulai dengan adanya penjangkaran yaitu rekrutmen bakal calon anggota DPRD Kabupaten atau Kota oleh struktur partai melalui DPD, DPC, PAC atau ranting partai yang bersangkutan. Adapun pendaftarannya langsung anggota partai tersebut mencalonkan diri sebagai calon anggota DPRD Kabupaten atau Kota ke dalam struktur partai baik ke DPD, DPC, PAC atau ranting partai. d) Dalam menjalankan perannya di dunia politik, kader perempuan di DPC PDIP Kota Cirebon mengalami hambatan yaitu hambatan ekonomi, kultural, dan psikologi.

1. Ethics of care

Produk undang-undang tersebut di atas merupakan kebijakan politik untuk mengakomodasi peranan perempuan secara adil dalam aktivitas politik. Perempuan perlu memperjuangkan keadilan disebabkan karena dalam struktur sosial yang ada

ketidakadilan terhadap perempuan telah berlangsung lama bahkan terjadi sepanjang sejarah manusia. Jika seorang laki-laki mengalami ketidakadilan dianggap sebagai suatu kemalangan (*misfortune*), namun jika seorang perempuan mengalami ketidakadilan dianggap sebagai sebuah penderitaan (*misery*), yang tidak dapat dipahami oleh laki-laki. Penderitaan pada laki-laki adalah penderitaan disebabkan oleh kekurangan hak sedangkan penderitaan yang dialami oleh perempuan adalah akumulasi dari semua jenis penderitaan, termasuk penderitaan terhadap harapan akan masa depan. Dalam posisi ini tampak bahwa distingsi/pembedaan antara *ethics of right* (etika hak) dan *ethics of care* (etika kepedulian) tidak dimasukkan sebagai pertimbangan dalam pembuatan kebijakan public, termasuk dalam affirmative action.

Dengan kata lain, affirmative action bertumpu pada basis etika hak, transaksi hak, jumlah hak yang diperlukan tetapi bukan pada *ethics of care*. Feminisme, dalam *ethics of care*, menempatkan pemikiran laki-laki untuk lebih bersedia memahami relasi sosial laki-laki dengan perempuan dengan lebih adil dan fair. Laki-laki telanjur dimanjakan oleh budaya, status quo dan menikmati insentif kekuasaan genetika sosialnya, dan Laki-laki cenderung gagap dalam memandang perempuan secara lebih care dalam cara pandang yang lebih adil dan beradab (*ethics of care*). Cara pandang ini di dalam tradisi Indonesia bukanlah hal baru karena telah memiliki diskursus budaya berpikir feminis atau berpikir tentang menghormati/peduli perempuan. Lokal wisdom yang tumbuh di dalam masyarakat tradisional Indonesia menunjukkan frame feminis-caring. Diskursus 'ibu pertiwi' 'bundo kandung' "dewi Sri" adalah contoh-contoh praktik feminis yang telah dilakukan oleh masyarakat Indonesia.

Ethics of care adalah reaksi terhadap *ethics of rights*, di mana *ethics of care* bersifat lokal/situasi lokal sedangkan *ethics of rights* bersifat universal. *Ethics of care* selalu dimulai dari situasi ketidakadilan yang tidak dipahami oleh *ethics of rights* yang ditulis dengan perspektif yang bias kekelakian. Keadilan pada perempuan perlu diperjuangkan karena perempuan mengalami ketidakadilan. (Jangan mengajari perempuan tentang teori ketidakadilan karena setiap hari perempuan mengalami ketidakadilan).

2. Partai Politik

Partai politik dianggap dapat dan mampu menyalurkan aspirasi dan partisipasi masyarakat dalam politik. Miriam Budiarjo (Dasar-Dasar Ilmu Politik 2009) mengartikan bahwa partai politik sebagai suatu kelompok terorganisir yang anggota-anggotanya memiliki orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama. Adapun tujuan-tujuan dari partai politik ialah agar mendapatkan kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik dengan cara konstitusional agar dapat melaksanakan programnya. Salah satu program di dalam partai politik tersebut ialah menjaring aspirasi masyarakat.

Negara yang menganut paham demokrasi, keberadaan partai politik merupakan atribut dari sistem demokrasi. Meskipun dalam partai politik tidak memiliki kewenangan dalam merumuskan kebijakan publik akan tetapi keberadaan partai politik baik secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi pemerintah selaku perumus kebijakan publik dan mengeksekusi kebijakan tersebut.

Dalam perspektif Dahlerup (2005), *affirmative action* merujuk pada konsep "positive discrimination" dalam jangka waktu tertentu dan dalam rangka meningkatkan representasi kaum perempuan dalam politik. Dahlerup mengatakan

bahwa *affirmative action* dalam bentuk kuota gender ini mengalokasikan prosentase atau jumlah tertentu untuk kaum perempuan dalam institusi politik. Dijelaskan bahwa "The core idea behind quota systems is to recruit women into political positions and to ensure that women are not only a few tokens in political life".

Partisipasi politik adalah keikutsertaan dalam kegiatan politik. Pengertian yang lebih dapat dikatakan bahwa partisipasi politik ialah kegiatan seseorang atau sekelompok orang ikut serta dengan aktif di dalam kehidupan politik.

David Easton, seorang sarjana politik yang melakukan telaahan atas kehidupan politik dalam kaitannya dengan sistem, memperkenalkan dua macam input ke dalam sistem politik, yaitu "tuntutan" dan "kebutuhan" (Easton dalam Afan Gaffar, 1989). Segala macam bentuk tuntutan dalam sistem politik dapat diklasifikasikan dengan berbagai cara. Ini pula yang terjadi terhadap peran perempuan dalam komunikasi politik. Di mana perempuan memiliki hak yang sama terhadap akses politik yang selama ini hanya dimanfaatkan oleh kaum laki-laki. Fenomena ini yang pada gilirannya mengusung perempuan untuk mewujudkan segala tuntutan dan kebutuhan dalam sistem politik.

Gramsci membedakan "dominasi" dan "hegemoni." Keduanya adalah cara yang biasa dipakai untuk menciptakan dan menopang kekuasaan penguasa. Dominasi menopang kekuasaan melalui paksaan dengan menggunakan kekuatan fisik (koersi). Artinya, seseorang atau kelompok terpaksa (dipaksa) tunduk terhadap kepentingan penguasa. Sedangkan dalam hegemoni, kelompok yang dikuasai tidak dipaksa dengan kekuatan koersi, melainkan mereka secara sukarela menyetujui penerapan kuasa penguasa atas dirinya (hegemoni sebagai konsensus). Untuk itu, langkah

pertama yang dilakukan oleh penguasa adalah memastikan bahwa ide-ide yang sarat kepentingan diinternalisasi oleh pihak yang dikuasai. Internalisasi ide tersebut diperlukan agar ide dan kepentingan dari penguasa tidak ditentang, sehingga penguasaan terhadap mereka menjadi sesuatu yang “legitimated” dan nampak wajar.

Meskipun dominasi juga merupakan salah satu sumber kekerasan terhadap perempuan, namun dominasi bukan penyebab utama lestarnya hal itu. Hegemoni adalah penyebab utamanya; bahwa lestarnya kekerasan terhadap perempuan terjadi atas dasar kesepakatan bersama antara laki-laki dan perempuan itu sendiri. Kekerasan terhadap perempuan menjadi sesuatu yang “wajar,” sehingga tidak perlu dipermasalahkan (dalam Scientarum.com).

H. Harris Soche, menjelaskan bahwa demokrasi adalah salah satu bentuk pemerintahan rakyat. Yang dapat diartikan bahwa rakyat atau orang banyak yaitu pemegang kekuasaan dalam pemerintahan. Mereka memiliki hak untuk mengatur, mempertahankan dan melindungi diri dari adanya paksaan dari wakil-wakil mereka, yaitu orang atau badan yang disertai dalam wewenang untuk pemerintah (dalam cerdika.com).

Joseph A. Schmeter, secara terminologis menjelaskan bahwa demokrasi merupakan suatu perencanaan institusional untuk mencapai keputusan politik dimana individu-individu memperoleh kekuasaan untuk memutuskan cara perjuangan kompetitif atas suara rakyat (Titik Triwulan, 2015).

Di dalam konteks negara modern, demokrasi tidak lagi bersifat langsung, melainkan adanya badan-badan perwakilan yang di dalamnya duduk mewakili rakyat untuk membawa keinginan, kemauan, serta bisa menampung aspirasi-aspirasi rakyat. Demokrasi dengan sistem

perwakilan di beberapa negara tidaklah sama. Adapun perbedaan itu dapat menunjuk kepada cara penunjukannya dari pada wakil-wakil rakyat, cara penyusunannya badan perwakilan, cara pengambilan keputusan badan perwakilan, hubungan antara badan perwakilan dengan badan-badan yang menyelenggarakan pemerintahan, serta tugas dan wewenang badan-badan perwakilan tersebut. Secara keseluruhan menunjukkan dalam menyelenggarakan suatu sistem pemerintahan demokrasi dengan jalan perwakilan, namun jarang sekali ketatanegaraan sesuatu negara sepenuhnya akan sama dengan ketatanegaraan lainnya (Titik Triwulan, 2015).

Konsepsi Freud, seperti tahapan Oedipal dan kompleks Oedipus, mereka mengklaim bahwa ketidaksetaraan gender berakar dari rangkaian pengalaman pada masa kanak-kanak awal mereka, yang mengakibatkan bukan saja cara laki-laki memandang dirinya sebagai feminin, melainkan juga cara masyarakat memandang bahwa maskulinitas adalah lebih baik daripada femininitas. Feminisme radikal kultural yang dipelopori oleh Marilyn French, mengatribusikan perbedaan laki-laki dan perempuan lebih kepada biologi (*nature/alam*), daripada kepada sosialisasi (*nurture/pengasuhan*). Sedangkan feminisme eksistensial yang dipelopori oleh Simon de Beauvoir dalam bukunya *Second Sex*. Mengatakan bahwa Partisipasi pada hakekatnya dapat terjadi di setiap kegiatan manusia. Partisipasi dapat terjadi di tahap perencanaan, pengambilan keputusan, implementasi dan pengelolaan kegiatan lebih lanjut. Partisipasi masyarakat menuntut keterlibatan penuh dari para pelakunya dalam mengambil keputusan, menjalankan keputusan dan bertanggung jawab akan konsekuensi dari keputusan yang disepakatinya. Keterlibatan para pelakunya ini tidak terbatas hanya pada gagasan,

tetapi mencakup seluruh kemungkinan kontribusi seseorang. Jadi pengertian partisipasi dicirikan oleh: (a) adanya kesepakatan, (b) adanya tindakan pengisi kesepakatan tersebut, (c) adanya pembagian kerja dan tanggung jawab dalam kedudukan yang setara (Titik Triwulan, 2015).

Dahrendorf menegaskan, peran merupakan konsep kunci dalam memahami manusia sosiologis. Setiap orang menduduki sekian posisi sosial dan setiap posisi tersebut harus diperankannya. Role atau peranan merupakan dinamika dari status atau penggunaan dari hak dan kewajiban atau bisa disebut status subyektif (Poloma, 1994).

Teori Feminisme ada karena adanya perbedaan gender dimana perempuan kerap diperlakukan berbeda dari gender laki-laki hal inilah yang menjadikan timbulnya pergerakan feminisme. Feminisme sendiri memiliki arti femme yang berarti perempuan, di mana ini adalah sebuah gerakan atau aktivitas perempuan yang memperjuangkan keseimbangan gender antara perempuan dan laki-laki. Tujuan dari gerakan ini agar tercapainya kesetaraan dan kesamaan hak serta kewajiban yang diterapkan pada semua gender yaitu perempuan dan laki-laki.

Secara garis besar, perkembangan dan sejarah teori feminisme dibagi menjadi dua gelombang. Secara garis besar feminisme muncul dan berkembang pada sekitar abad 18 pada era enlightenment atau zaman pencerahan yang menjadi titik terang kebangkitan dan kemajuan secara global. Gerakan feminisme lahir dengan diprakarsai oleh Lady Mary Wortley Montagu dan Marquis de Condorcet dengan mengungkap perjuangan yang disebut universal sisterhood di negara-negara jajahan Eropa. Istilah feminisme dibuat Charles Fourier di tahun 1837 yang kemudian dipopulerkan dengan adanya publikasi buku berjudul *The Subjection of Women* oleh John Stuart Mill pada tahun 1869. Berkembang pesat

di masa tersebut karena banyaknya kasus penindasan dan pengekangan terhadap hak-hak perempuan di berbagai aspek kehidupan dan sosial masyarakat (dalam pakarkomunikasi.com)

Di dalam perkembangan feminisme semakin tersebar ke berbagai penjuru dunia dengan adanya pelopor pergerakan seperti Helena Cixous di Perancis dan Juia Kristeva di Bulgaria. Helana membuat dan menerbitkan tulisan yang berjudul *The Laugh of Medusa* mengkritik dominasi kehidupan sosial masyarakat dan logosentrisme yang masih banyak dikuasai oleh nilai maskulin atau gender laki-laki.

Sebagian besar teori mengatakan bahwa keadilan memiliki tingkat kepentingan yang besar. John Rawls, filsuf Amerika Serikat yang dianggap salah satu filsuf politik terkemuka abad ke-20, menyatakan bahwa "Keadilan adalah kelebihan (virtue) pertama dari institusi sosial, sebagaimana halnya kebenaran pada sistem pemikiran" (John Rawl, 1999).

Menurut Adam Smith yang disebut keadilan sesungguhnya hanya punya satu yaitu keadilan komutatif yang menyangkut kesetaraan, keseimbangan, keharmonisan hubungan antara satu orang atau pihak dengan orang atau pihak yang lain. Sedangkan keadilan legal sesungguhnya sudah terdapat dalam keadilan komutatif, karena keadilan legal sesungguhnya hanya konsekuensi lebih lanjut dari prinsip keadilan komutatif yaitu bahwa demi menegakkan keadilan komutatif negara harus bersikap netral dan memperlakukan semua pihak secara sama tanpa terkecuali.

Partai Golkar adalah partai yang sudah cukup lama berdiri. Upaya partai Golkar dalam konsolidasi dan optimalisasi potensi dan kekuatan kader partai, dan untuk perluasan dan perekrutan basis massa, Partai Golkar mendirikan sayap partai yang berisikan pemuda dan perempuan

untuk mendukung kerja politik di lapangan. Sebagai bagian dari Partai Golkar, Organisasi Sayap Perempuan Partai Golkar dituntut untuk memperkuat gerakannya dalam rangka penggalangan massa kelompok strategis perempuan sebagai kekuatan potensial dan melakukan kegiatan-kegiatan membesarkan dan memajukan Partai Golkar.

C. Metode Penelitian

Kajian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yang berusaha menggambarkan dan menginterpretasikan objek sesuai dengan apa adanya. Menurut Saryono (2010), Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang digunakan untuk menyelidiki, menemukan, menggambarkan, dan menjelaskan kualitas atau keistimewaan dari pengaruh sosial yang tidak dapat dijelaskan, diukur atau digambarkan melalui pendekatan kuantitatif. (Saryono 2010). Penelitian deskriptif bertujuan untuk membuat deskripsi sistematis, yang akurat tentang fakta-fakta dan sifat-sifat populasi daerah tertentu, umumnya, masalah yang dirumuskan dalam metode tidak boleh terlalu luas. Tujuan tidak terlalu umum, data yang digunakan harus dari data yang terpercaya bukan opini. Studi kasus dalam kajian ini berusaha mendeskripsikan suatu latar, objek atau suatu peristiwa tertentu secara mendalam. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Februari 2021 sampai Mei 2021 di DPD Partai Golkar Kabupaten Magetan.

Data dalam kajian diperoleh dengan cara purposive sampling yaitu peneliti akan menentukan informan penelitian berdasarkan informan kunci dan informan tambahan. Data yang diperoleh kajian ini dikelompokkan menjadi dua yaitu: Sumber data primer, adalah data pertama kali yang dikumpulkan langsung di lapangan, disebut

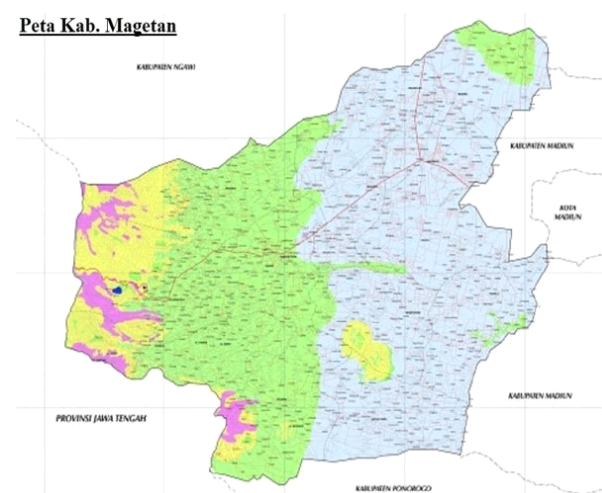
data primer/data pertama atau data mentah. Data sekunder merupakan berbagai informasi yang telah ada sebelumnya dan dengan sengaja dikumpulkan oleh peneliti yang digunakan untuk melengkapi kebutuhan data penelitian. Data sekunder didapatkan melalui buku, publikasi pemerintah, catatan internal organisasi, laporan, jurnal, hingga berbagai situs yang berkaitan dengan informasi yang sedang dicari.

Teknik yang dilakukan dalam pengambilan data dalam kajian ini melalui observasi partisipan; wawancara mendalam berupa Interview terstruktur. Dalam interview berstruktur, pertanyaan dan alternatif jawaban yang diberikan kepada interview telah ditetapkan terlebih dahulu. Interview tak berstruktur Ini lebih bersifat informal. Pertanyaan-pertanyaan tentang pandangan hidup, sikap, keyakinan subjek atau tentang keterangan lainnya dapat diajukan secara bebas kepada subjek.

Teknik analisa data adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, memproses data untuk dijadikan informasi. Mengutip salah seorang pakar metode penelitian, Lexy J. Moleong, menjelaskan bahwa teknik analisis data adalah kegiatan analisis pada suatu penelitian yang dikerjakan dengan memeriksa seluruh data dari instrumen penelitian, seperti catatan, dokumen, hasil tes, rekaman, dan lain-lain. Kegiatan ini dilakukan agar data lebih mudah dipahami, sehingga diperoleh suatu kesimpulan. Beberapa teknik analisis data kualitatif berupa analisis konten, analisis Naratif dan analisis wawancara. Kajian ini menggunakan analisis konten, naratif dan wacana agar dengan mudah dipahami pembaca dan lebih mudah pula dikembangkan tanpa membatasi responden dalam memberikan argument yang diberikan. Demikian pula cara pengecekan keabsahan data dan memperoleh data yang valid digunakan

cara-cara; Perpanjang kehadiran, triangulasi data dan diskusi dengan sejawat.

Lokasi penelitian bertempat di Kabupaten Magetan. Kabupaten Magetan adalah sebuah kabupaten yang berada di Provinsi Jawa Timur, Kabupaten ini berbatasan dengan Kabupaten Ngawi di sisi utara, Kota Madiun dan Kabupaten Madiun di sisi timur, Kabupaten Ponorogo, serta Kabupaten Karanganyar yang termasuk Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Wonogiri yang juga termasuk dalam Provinsi Jawa Tengah. Kabupaten Magetan ini juga memiliki salah satu pangkalan utama Angkatan Udara Republik Indonesia yang bertempat di Kecamatan Maospati.



Gambar 4.1 Peta Kabupaten Magetan.

Kabupaten Magetan juga terkenal dengan Gunung Lawu yang terdapat di bagian barat Kabupaten, yakni perbatasan antara Jawa Tengah. Tidak hanya itu Kabupaten Magetan juga terkenal dengan telaga Sarangan yang menjadi salah satu tempat wisata yang cukup terkenal di kabupaten ini, tidak hanya itu Magetan juga terkenal dengan kerajinan kulit seperti (tas, sepatu, sandal, dll), anyaman bamboo, rengginang, dan produksi jeruk pamelos atau biasanya disebut jeruk bali, serta kerupuk lempeng yang terbuat dari nasi.

Letak Geografis Kabupaten Magetan terletak pada posisi Kabupaten Magetan

terletak pada posisi $7^{\circ}38'30''$ Lintang selatan dan $111^{\circ}20'30''$ Bujur Timur. Secara administrasi, Kabupaten Magetan terdiri dari 18 kecamatan dengan 208 desa dan memiliki 27 kelurahan, sebanyak 822 dusun atau lingkungan yang ada di kabupaten Magetan. Luas Kabupaten Magetan mencapai $688,85 \text{ km}^2$. Kecamatan Plaosan merupakan kecamatan terluas dengan luas $66,09 \text{ km}^2$ sedangkan Kecamatan Karangrejo dengan luas $15,15 \text{ km}^2$ merupakan kecamatan dengan luas terkecil.

Dari sisi ekonomi potensi yang ada di Kabupaten Magetan ini antara lain: Sentra Kerajinan kulit, Sentra perkebunan Pamelos, Sentra kerajinan anyaman bambu, Sentra ayam panggangan gandum yang cukup terkenal di kalangan menengah ke atas, Sentra batik sidomukti, Sentra industri genteng winong.

D. Hasil Penelitian

Merujuk pada platform Aksi Beijing dan Konvensi tentang penghapusan segala bentuk yang membuat diskriminasi terhadap kaum perempuan. Aksi ini merekomendasikan agar semua pemerintahan yang ada di dunia agar memberlakukan peningkatan jumlah perempuan di dalam jabatan-jabatan appointif maupun elektif di dalam pemerintahan lokal maupun di dalam pemerintahan nasional karena masih sering terjadi diskriminasi yang dialami kaum perempuan dari segala aspek dan sektor yang ada di dalam kehidupan. Adapun tingkat diskriminasi sangat bervariasi di berbagai wilayah dan negara, hingga sampai saat ini belum banyak perempuan yang menikmati kesetaraan dalam hak-hak hukum, sosial, ekonomi maupun dalam politik. Untuk itu persoalan perwakilan perempuan menjadi hal penting. Dalam kehidupan sehari-hari perempuan tidak secara proporsional

terlibat di dalam kehidupan di rana publik maupun diranah politik. Hal ini menjadi serius apabila di lihat dari komposisi penduduk antara laki-laki dan perempuan sebenarnya adalah berimbang. Di dalam representasi perempuan dalam bidang politik dapat dikatakan masih jauh dari apa yang diharapkan. Pendidikan politik merupakan salah satu aktivitas yang bertujuan dalam membentuk dan menumbuhkan orientasi politik pada individu maupun kelompok. Adapun manfaat dari pendidikan politik agar masyarakat luas dapat menjadi warga negara yang sadar dan menjunjung tinggi akan kewajiban dalam berbangsa dan bermasyarakat serta memperhatikan keadilan kesetaraan gender.

Pada kenyataannya, di dalam peran publik, kesenjangan peran antara kaum pria dan kaum perempuan masih terjadi. Peningkatan peranan perempuan di dalam pembangunan yang berwawasan gender adalah bagian integral dari pembangunan nasional, mewujudkan kesejajaran/kesetaraan dan keadilan gender dalam berbagai kegiatan khususnya dalam bidang politik. Sehingga perlu meningkatkan pendidikan politik bagi kaum perempuan dalam berbagai segi seperti organisasional, pemantapan pilar-pilar demokrasi melalui lembaga legislatif, eksekutif, maupun yudikatif yang aspiratif dan pro terhadap kepentingan perempuan. Pendidikan politik perlu ditingkatkan agar tumbuh kesadaran politik dikalangan perempuan sehingga mampu memanfaatkan kesempatan dan peluang yang ada sesuai potensi yang dimiliki. Jika ingin menempatkan perempuan sebagai elemen penting dalam demokrasi Indonesia, demokrasi yang ramah gender. Berbeda dengan politisi laki-laki yang lebih memiliki narasi besar, aktivis perempuan seharusnya fokus dan konsisten untuk memperjuangkan kuota 30 persen representasi politik perempuan sebagai agenda perjuangan bersama.

Perjuangan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender pada kaum perempuan dalam politik dan mewujudkan representasi politik perempuan di negeri ini masih membutuhkan waktu yang panjang. Diperlukan perjuangan ekstra keras untuk membuktikan bahwa perempuan mampu berkontribusi di dalam politik praktis secara signifikan. Di dalam masyarakat yang sudah terlanjur meyakini kodrat perempuan sebagai makhluk lemah dan sensitif di butuhkan upaya keras dalam mengonstruksikan isu representasi politik perempuan dibingkai demokrasi yang setara dan partisipatif. Berkaitan dengan hal ini, dalam diskusi dengan Ketua dan sekretaris Partai Golkar Magetan menyatakan pendapat sebagai berikut:

“Penting sekali dalam memperjuangkan keadilan perempuan karena yang hidup di dunia ini kan tidak hanya laki-laki saja perempuan juga ada, kalau hanya laki-laki yang bersuara terus pasti perempuan juga tidak terima, kan mereka juga punya pendapat masing-masing. Pasti kita harus bersikap adil dalam pengambilan keputusan apalagi di dalam masalah yang berhubungan dengan partai ini pasti kita ajak rembung juga yang perempuan.

Sekretaris Partai Golkar Magetan kemudian melanjutkan:

“Sama saja mana perempuan dengan laki-laki di sini pada saat musyawarah juga ibu-ibu yang ada di pengurusan juga kita undang untuk rembukan, kan memang di sini kebanyakan sudah ibu-ibu ya yang jadi pengurus. Nah itu kita hubungi kita undang untuk musyawarah ya agar nanti hasilnya tidak diputuskan oleh bapak-bapak yang pengurus saja tapi ibu-ibu juga ada. Dari situkan kita juga membantu perempuan dalam mencapai keadilan kita tidak membatasi mereka dalam berargumen.

Kemudian Pak ketua menyela:

“Biasanya juga ibu-ibu punya kegiatan sendiri ya kegiatan di dalam politik ini kita dukung juga biasanya ada acara kecil-kecilan di rumah PK (Pengurus Kecamatan yang tergabung dalam partai) ya kita bantu mempersiapkan apa yang dibutuhkan ibu-ibu. Jadi ya memang perlu perempuan itu sekarang sama dengan laki-laki wong sama-sama haknya untuk berpendapat”.

Ibu Happy, wakil ketua pemberdaya perempuan menanggapi bahwa:

“Ya kalau menurut saya pribadi perempuan itu memang harus wayahe berubah ora mong meneng ae di apak-apakne meneng ae, disalahne mong iso meneng wong yo ora salah kok gelem disalahne mergo wedi karo wong lanang. Politik yo gak gor wong lanang tok sak iki yo akeh wong wedok, ya jadi nek diomong perlu ya perlumbak perempuan itu berpolitik apalagi memperjuangkan keadilan. (Perempuan itu memang harus waktunya berubah tidak hanya diam saja diapa-apakan diam saja, di salahkan hanya bisa diam padahal tidak salah kok mau disalahkan karena takut dengan laki-laki. politik tidak hanya orang laki-laki saja sekarang juga banyak perempuan, ya jadi kalau dibilang perlu ya perlu mbak apalagi memperjuangkan). Di partai Golkar Megetan ini Alhamdulillah mbak, kita ibu-ibu memang didukung sekali dalam kegiatan-kegiatan yang biasanya kita buat. Bapak-bapak juga tidak pernah membatasi kita dalam berpendapat”.

Mbak Dewi, sekertaris pemberdayaan perempuan sekaligus pengurus sekretariat Partai Golkar Kabupaten Magetan menimpali:

“Tidak ada perempuan itu harus diam saja saat ini, wong oponeh wedok sak iki yo iso sukses (apalagi perempuan saat ini ya bisa sukses) yang jadi mentri juga perempuan banyak haruslah di dukung diperjuangkan perempuan itu di dalam berpolitik dan harus juga dilindungi pendapat-pendapatnya jangan dianggap remeh. Aktivitas politik perempuan saat ini juga hampir dapat dikatakan sama dengan laki-laki. wes gak wayahe wong wedok mong meneng-meneng tok neng jero umah wayahe berubah neng partai ben ndang maju wong wedok (sudah gak jamannya orang perempuan hanya diam-diam saja di dalam rumah sudah waktunya berubah di partai agar perempuan cepat maju berkembang).

Hamim, wakil bendahara Partai Golkar Kabupaten Magetan ikut berkomentar:

“Di partai politik ini perlu sekali perempuan ada apa lagi di era sekarang perempuan memang harus disamakan gendernya dengan kaum laki-laki, tidak hanya di ajak berpolitik menjadi aktivis politik melainkan juga ya harus kita bantu mereka memperjuangkan kaum-kaumnya karena tidak semua perempuan juga dapat berpolitik dan boleh berpolitik, banyak yang benturan dengan suami yang tidak mengizinkan dan orang tua yang tidak boleh. Tapi jika tidak ada perempuan siapa lagi yang paham dengan perempuan selain perempuan itu sendiri” ujarnya semangat.

Di dalam partai politik saat ini ditetapkan bahwa harus ada kuota 30% di

dalam kepengurusan struktural di dalam partai politik. Demikian juga dalam partai politik harus menyertakan peserta calon anggota legislatif perempuan ikut di dalam pencalegkan minimal 30%.

Partai Golkar sendiri ada sebuah Surat Keputusan Nomor: I/RAPIM-V/GOLKAR/2002 Tanggal 8 Februari 2002, yang memberi penegasan resmi tentang pembentukan organisasi sayap Partai Golkar, di bidang pemuda dan perempuan. Dengan keputusan ini, kedudukan organisasi sayap pemuda dan perempuan menjadi bagian struktur internal partai, yang bersifat instruktif, dan bertanggung jawab kepada Dewan Pimpinan Partai Golkar.

Menindaklanjuti surat keputusan tersebut, proses dan tahapan pembentukan pun dijalankan, 26 Maret 2002, diinisiasi Ketua Korbid Perempuan DPP Partai Golkar kala itu, dilakukan pertemuan para tokoh perempuan yang kemudian menghasilkan kesepakatan untuk membentuk wadah perempuan Partai Golkar. Pada 22-23 Mei 2002, digelar Rapat Kerja Nasional Bidang Perempuan, dengan peserta seluruh Ketua Bidang Perempuan Partai Golkar Provinsi dan Pimpinan Ormas Perempuan, yang menghasilkan 7 (Tujuh) Prinsip Pembentukan Organisasi¹

Affirmative adalah sebuah tindakan khusus yang memiliki arti kesetaraan dan keadilan gender bagi kaum perempuan di dalam politik. *Affirmative* action kemudian memberi tempat atau wadah untuk memotivasi/support kepada kaum perempuan yang memiliki kapabilitas dan kapasitas dalam meralisasikan kesetaraan agar tidak adanya diskriminasi terhadap kaum perempuan.

Salah satu dari 8 Millenium Developments Goals (MDG) yang disepakati oleh

¹ <https://www.partaigolkar.com/kesatuan-perempuan-partai-golkar/>

189 negara anggota PBB, September 2000, (ditargetkan tercapai 2015) terkait dengan 30% perempuan di parlemen di seluruh dunia².

Jika *affirmative action* dianggap sudah berhasil, maka kuota bagi perempuan akan di hilangkan secara otomatis yang berarti bahwa perempuan dapat berkompetensi di dalam publik terutama di dalam bidang politik. Lebih dari itu, perempuan yang duduk di dalam parlemenpun dapat menjadi lebih optimal dalam memberikan suara-suara terkait isu-isu gender. Masa yang akan datang diharapkan perempuan tidak hanya bereksplorasi di dalam ranah gender saja, tetapi dapat setara dengan kaum laki-laki di dalam pengambilan kebijakan strategis pembangunan bangsa dan peningkatan kesejahteraan rakyat. Representasi perempuan yang menjadi anggota parlemen membuat keterwakilan aspirasi perempuan di parlemen benar-benar kuat. Harus ada strategi yang diterapkan agar kualitas perempuan dalam parlemen meningkat untuk jangka panjang. Adapun strategi tersebut yaitu dengan memberikan pendidikan politik kepada perempuan yang memiliki tingkat kualitas dalam kepemimpinan baik untuk menjadi pejabat publik. Peran perempuan dalam pengambilan keputusan dapat memperkuat eksistensi perempuan di ranah politik dan menunjukkan bahwa perempuan juga berkompetensi di ranah politik, menjadi abdi negara. Tentunya hal ini dapat mengubah pemikiran di masyarakat tentang keberadaan perempuan di dalam ranah publik dan politik, memberikan pandangan terhadap masyarakat luas bahwasannya kodrat wanita sama dengan laki-laki yaitu memiliki hak yang sama dalam berbagai bidang.

² Ria S., Fransisca, (2013), Caleg Perempuan Dibalik "Kursi Istimewa", <http://www.shnews.co/detile18208-caleg-perempuan-di-balik-%E2%80%9Ckursi-istimewa%E2%80%9D.html>. Sinar Harapan, Diakses tanggal 19 Januari 2014

Kondisi ini kemudian perlahan-lahan dapat mengubah pandangan masyarakat tentang posisi perempuan di dalam bidang publik dan politik. Keadaan ini pula akan membuat partisipasi perempuan meningkat jumlahnya memasuki panggung politik sebagai anggota parlemen, dan diharapkan memberikan efek positif terhadap pembangunan gender yang lebih konkret. Penguatan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai yang dibangun atas dasar kesetaraan dan keadilan gender, dibutuhkan keberanian dan kesadaran untuk meminimalisir pemikiran patriarki politik. Program kerja partai politik harus ada pendidikan kepada masyarakat tentang pentingnya peran perempuan di dalam masyarakat dan kesetaraan keadilan gender. Adanya dorongan perwakilan perempuan di parlemen tidak hanya didukung oleh partai politik melainkan juga negara harus ikut berperan dalam pendidikan politik bagi masyarakat. Ketua Partai Golkar Kabupaten Magetan memberikan pendapatnya tentang hal ini.

"Adanya affirmative action ini membuat kita seperti ada dorongan untuk memenuhi target perempuan di dalam politik yang selama ini di gembor-gemborkan yaitu 30% dari kepengurusan partai harus adanya kaum perempuan. Nah di sini kita bersikeras juga untuk memenuhi jadi ada dorongan sendiri kita bagaimana target ini terpenuhi dan juga perempuan-perempuan yang sudah menjadi kader itu kita dengarkan suaranya dengan baik tidak hanya terkesan kita butuh mereka hanya untuk formalitas saja untuk memenuhi kebutuhan partai peraturan partai yang 30% tersebut. Jadi kita harus adil dalam mengambil keputusan kita pandang kaum perempuan kita pandang kaum laki-laki gak seperti zaman dulu laki-laki yang menjadi utama, saat ini tidak begitu kesannya kalau begitu kita seperti mengintimidasi perempuan kita butuhkan dia tapi kita tidak memberikan keadilan untuk mereka" ujarnya

Lain pendapat yang diberikan oleh bapak sekretaris partai:

"Adanya affirmative ini seperti aturan yang membuat kita sadar akan kedudukan perempuan saat ini, tidak berbeda dengan kaum laki-laki tidak ada kesan untuk tidak memperbolehkan lagi perempuan hanya

diam saja tidak boleh ikut berpolitik tidak boleh berpendapat, pokoknya ikut saja apa yang di bilang suami yang dibbilang laki-laki. Di partai Golkar saat ini memang benar-benar sedang giatnya untuk mempromosikan perempuan juga agar tidak tertinggal harus di rumah saja agar adanya kesetaraan gender. Karena saat ini ada juga peraturan bahwa di partai sekarang harus ada perempuan dan sudah diaturkan bahwa kuota perempuan di dalam partai sebanyak 30% tidak boleh kurang. Jadi kita sekuat tenaga harus memenuhi peraturan tersebut”.

Kemudian disimpulkan:

“Ada keadilan karena adanya peraturan sekarang sebanyak 30% pengurus dan kader-kader itu perempuan. Jadi tidak seperti dulu perempuan hanya beberapa orang saja bahkan dapat dikatakan tidak sampai 10% dari anggota partai. Tapi saat ini kan jadi banyak juga perempuan di dalam partai yang ikut menjadi kader-kader partai juga. Mungkin dulu juga perempuan itu gak seleluasa sekarang.

Ibu happy menegaskan:

“Dulu perempuan itu tidak bisa bersuara ya mungkin dianggap perempuan itu kurang penting jadi ya lebih baik diam saja. Tapi kan semenjak adanya peraturan adanya affirmative action perempuan sekarang berkesan lebih maju, lebih terlihat bahwa perempuan itu tidak hanya bisanya mengurus rumah tangga saja, perempuan juga banyak yang cerdas yang bisa berpolitik di partai dengan baik bahkan di luar partai yang berkecimpung di politik juga bagus-bagus tidak kalahlah dengan laki-laki” ujarnya.

Kemudian Dewi menegaskan kembali:

“Kalau di dalam partai Golkar ini sih menurut aku pribadi posisi perempuan ini ya bisa dibbilang cukup adil, karena perempuan disamakan haknya dengan laki-laki, ada kegiatan apa gitu yang berhubung dnegan partai juga perempuan-perempuan di sini tidak pernah tidak diajak ya pasti selalu dilibatkan”.

Bapak Hamim kemudian ikut menanggapi:

“Adil sudah perempuan kita ajak berembung setiap ada kegiatan kita juga ajak biar berkontribusi, kita tidak pernah membatasi mereka, kita beri mereka ruang-ruang untuk menyalurkan aspirasi mereka. Kita tidak pernah membedakan perempuan ini laki-laki kita harus lebih memperhatikan laki-laki karena dia pastinya lebih tegas lebih baik. Kita tidak pernah seperti itu di dalam partai”.

Keterlibatan kader di dalam partai politik adalah sebuah syarat dalam

mencalonkan diri baik untuk mencalonkan sebagai eksekutif maupun menjadi legislatif. Penempatan posisi perempuan di dalam struktur kepengurusan partai politik sangat dipengaruhi oleh struktur sosial dan budaya di dalam masyarakat. Dalam kepengurusan struktural DPD Golkar Kabupaten Magetan, posisi perempuan hanya berada di posisi wakil ketua dan wakil sekretaris saja.

Menurut ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Magetan Bapak Suratman yang sekaligus adalah wakil Ketua DPRD Kabupaten Magetan menjelaskan bahwa masih kurangnya keterlibatan perempuan dalam menyuarkan aspirasi-aspirasi masyarakat menjadi sebab mengapa kader-kader perempuan sering dipandang sebelah mata oleh kaum laki-laki. Padahal kaum perempuan umumnya lebih dapat merasakan apa yang dirasakan masyarakat, apa yang menjadi keluh kesah di dalam masyarakat secara riil daripada kaum laki-laki.

“Terkadang ibu-ibu yang ada di dalam partai ini diem aja kurang ada pendapat kalau kita musyawarah hanya lebih menonjol bapak-bapaknya jadi kita juga tidak bisa memaksa mereka harus berpendapat mereka harus lebih dari laki-laki. Ya jadi mungkin kesannya di laki-laki si perempuan ini tidak memiliki suara yang dapat mengalahkan laki-laki begitu. Padahal kita juga tidak membatasi mereka kok di dalam berpendapat kita kasih mereka ruang terbuka. Perempuan ini sebenarnya lebih dapat merasakan masyarakat kan karena naluri lah lebih bagus daripada laki-laki, perempuan lebih paham keluh kesahnya masyarakat”.

Akan tetapi menurut sekretaris DPD Partai Golkar Kabupaten Magetan Bapak Mohyar yang sekaligus menjadi Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Magetan beliau mengatakan bahwa kader perempuan di DPD Partai Golkar Kabupaten Magetan dapat dikatakan sangat baik dalam menjalankan roda organisasi dan selalu aktif di dalam aktivitas-aktivitas organisasi yang digelar

menyuarakan adanya pandangan tentang masyarakat Kabupaten Magetan bahwa suatu keanehan bila seorang perempuan hanya perlu fokus di dalam mengurus rumah tangga dan tidak perlu terjun ke dunia politik. Sekretaris DPD Partai Golkar Kabupaten Magetan berujar:

“Setiap ada acara kader-kader perempuan ini aktif sejauh ini yang saya ketahui mereka pasti datang kalau ada acara partai, adapun acara di luar kantor DPD mereka juga pasti datang. Jarang ada yang absen kecuali memang ada keperluan lainnya. Bagus sih menurut saya mereka aktif berorganisasi di sini. Malah udah gak aneh ya sekarang perempuan bebas berorganisasi tidak hanya di rumah saja mengurus rumah tangga. Tapi ya ada yang berpendapat perempuan lebih baik di rumah saja ngurusin anak, masak, bersih-bersih rumah”

Pandangan ini kemudian menyebabkan sangat sulit kader-kader perempuan yang mampu berkembang di dalam dunia politik, hal yang seperti inilah yang menjadi penyebab rendahnya calon legislatif yang ikut mencalonkan diri di dalam pemilu 2019 lalu. Mereka merasa tidak percaya diri dalam mencalonkan diri, merasa takut bersaing dengan kaum laki-laki, tidak diizinkan oleh suami dan segan dalam bersaing dengan laki-laki.

Dari wawancara di lapangan ditemukan ada masalah lain yang muncul sebagai penghambat yaitu masalah ekonomi. Untuk mencalonkan diri menjadi calon anggota parlemen diperlukan biaya yang tidak sedikit. pernyataan ini dibenarkan oleh bapak Hamim Tohari yang menjabat sebagai Wakil Bendahara DPD partai Golkar Kabupaten Magetan. Beliau mengatakan bahwa kurangnya rasa berani untuk maju sendiri dalam melakukan pencalonan dikarenakan kader perempuan ini harus meminta izin terhadap suaminya terlebih dahulu dan jika sudah diizinkan maka mereka baru berani ikut dalam pencalonan, akan tetapi jika sebaliknya tidak diizinkan mereka akan mengurung niatnya maju dalam pecalonan tersebut.

“Perempuan yang mencalonkan diri pasti kebanyakan terbentur dengan suaminya yang gak mengizinkan buat ikut jadi caleg, selain itu juga kan kebanyakan mereka dari faktor ekonomi tidak semapan laki-laki, ibu-ibu ini uang belanja kan dapet dari suaminya, lah kalo suaminya gak mengizinkan gak mungkin juga mereka mau mencalonkan dan dapat dana dari mana. Ya kecuali mereka diizinkan suami ya pasti mereka daftar”.
Keterangan Hamim Tohari.

Namun partai Golkar Kabupaten Magetan para kader perempuannya, terbilang berperan cukup aktif di dalam memberikan dukungan-dukungan terhadap partai dan berproses dengan baik di dalam partai. Dukungan dari perempuan tersebut berupa berperan aktif dalam melakukan kegiatan-kegiatan partai ikut serta bersosialisasi di masyarakat. Upaya mendorong keterwakilan perempuan di dalam Partai Golkar Kabupaten Magetan juga nampak berupa antusias yang tinggi dalam pencalonan tahun 2019. Terdapat nama-nama calon perempuan di beberapa dapil walaupun tidak ada satupun nama tersebut yang lolos ke dalam kursi parlemen. Pernyataan ini disampaikan oleh ibu Happy Agusta yang menjabat sebagai Wakil Ketua bidang Pemberdayaan Perempuan dan dibenarkan pula oleh Dewi Oktavia yang menjabat sebagai Wakil Sekretaris bidang Pemberdayaan Perempuan. Hasil Pileg 2019 lalu menunjukkan bahwa tidak ada perempuan dari Partai Golkar di Kabupaten Magetan yang berhasil menduduki kursi di parlemen walaupun Partai Golkar salah adalah partai yang terbilang kuat di Kabupaten Magetan. Pada saat Pileg 2019 Partai Golkar ini memenangkan 5 kursi semuanya laki-laki.

Ibu Happy menjelaskan:

“Untuk peran perempuan di dalam partai ini sih terbilang cukup aktif setiap ada kegiatan mereka antusias juga kok untuk ikut meramaikan. Setiap ada kegiatanlah mereka pasti ada ya ikut serta, bahkan di waktu pemilu 2019 lalu juga mereka ikut serta dalam menjadi caleg ya walaupun tidak ada yang terpilih sih mungkin belum jodohnya.

Akan tetapi selama ini kader-kader perempuan ini selalu berperan aktif di acara-acara dan giat juga membuat acara dapat dikatakan bahwa peran actionnya bagus di kalangan masyarakat karena memang aktif dalam berbagai kegiatan di masyarakat”.

Kemudian Dewi menimpali:”

”ibu-ibu kader ini aktif selama ini di dalam kegiatan di masyarakat juga biasa kita adakan acara ya sebelum corona. Kita sering buat acara antusias juga mereka datang isuk-isuk ke DPD udan-udan yo tetep teko (pagi-pagi ke DPD hujan-hujan ya tetap datang). Ya kalau masalah jadi caleg kemaren memang belum ada yang menang terpilih jadi dewan ya tapi setidaknya antusias mereka ada begitu” ujar Dewi.

”Setidaknya kader-kader ini aktif saja kita juga sudah suka kok mbak, mereka antusias setiap ada kegiatan kita sudah suka. Jadi mereka juga terlihat tidak hanya diam saja demi memenuhi kuota partai ada nama tapi tidak ada orangnya. Ada acara penyuluhan tentang partai biasa kita ada buat acara begitu ya di lapangan mereka aktif juga kok” tanggap Bapak Hamim.

Yang menjadi salah satu penyebab dari internal partai ini adalah kurang banyaknya nama caleg perempuan yang dicalonkan. Namun kader perempuan dan kader laki-laki di partai Golkar dapat memengaruhi kebijakan yang ada di dalam internal partai dengan bermusyawarah. Musyawarah ini biasanya dilakukan dalam forum resmi maupun tidak dan selalu mendapat keputusan atau mufakat yang menjunjung nilai-nilai kebersamaan dan kebenaran. Hambatan yang memengaruhi ketidakberhasilan perempuan menjadi anggota legislatif yaitu hambatan psikologis dari diri perempuan sendiri, selain hambatan internal dan eksternal partai politik.

Terdapat banyak kader perempuan yang harus ditingkatkan partisipasi politiknya maka partai Golkar ini menyiapkan pelatihan kepemimpinan dan pelatihan manajemen waktu bagi kader perempuan. Adapun materi tentang kepemimpinan perempuan dan profil berbagai tokoh perempuan yang sukses menjadi seorang pemimpin dan sangat menginspirasi akan mulai dimasukkan dalam kegiatan training. Di dalam partai

juga melibatkan seluruh kader perempuan yang ada di dalam pelatihan-pelatihan kepemimpinan yang diselenggarakan oleh di DPD tingkat Kabupaten maupun DPW tingkat Provinsi. Manfaat dari adanya materi tentang manajemen waktu diharapkan kader perempuan ke depannya menjadi lebih baik dalam memanejemen waktu. Pelatihan kepemimpinan diharapkan agar kader perempuan ke depannya dapat menjadi pemimpin yang efektif dan dapat setara dengan kaum laki-laki. Pelatihan mamajemen waktu dilakukan pada saat awal kader perempuan tersebut bergabung ke dalam partai Golkar.

Menurut Bapak Suratman sebagai ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Magetan dan bapak Mohyar sebagai sekretaris DPD Partai Golkar Kabupaten Magetan, upaya-upaya yang dilakukan oleh partai dalam pembinaan kader perempuan merupakan upaya untuk meningkatkan dan menguatkan peran perempuan di dalam pembangunan politik.

”Ada pembinaan khusus terhadap kader-kader perempuan biar mereka lebih dapat memahami politik itu ada biar mereka lebih baik ke depannya kita adakan pembinaan secara khusus.” ujar Bapak Ratman.

”Biasanya setaun sih tidak sekali saja atau waktu pertama masuk tidak, untuk pembinaan kader perempuan ada beberapa kali dalam setahun, di provinsi juga sering mengadakan acara begitu, ya biar perempuan yang menjadi kader Golkar ini lebih mantap dalam berpolitik” ujar Bapak Mohyar.

Di Indonesia sendiri upaya kesetaraan gender ini memang sedang gencar untuk dilakukan, adanya pembinaan yang dilakukan di dalam partai Golkar Kabupaten Magetan ini menurut Wakil Ketua Bidang Pemberdaya Perempuan ibu Happy Augusta diberikan sesuai materi yang selalu dikembangkan sesuai dengan zaman diharapkan metode yang diberikan selalu terbaru tidak tertinggal oleh zaman dan

sesuai dengan kebutuhan perempuan. Perempuan memiliki perlakuan yang berbeda di dalam masyarakat oleh karena itu perempuan harus diberi tempat yang sesuai karena perempuan memiliki pengalaman yang berbeda untuk di perjuangkan kebutuhannya dan kepentingan perempuan lebih baik diwakilkan pula oleh perempuan.

“Di partai ini ada pembinaan biasanya ada dari DPD ya kita ada dari provinsi. Kita datangkan orang-orang yang memang memiliki keahlian khusus dalam bidang ini. Jadi sesuai perkembangannya materi-materinya itu tidak monoton begitu saja” ujar Ibu Happy Augusta.

Strategi partai serta komitmen dari partai dalam menyuarakan afirmatif terhadap kader perempuan tentu akan menjadi hal krusial di dalam meningkatkan kualitas keterwakilan perempuan, di samping itu pembinaan terhadap kader perempuan relevan terhadap tugas-tugas keanggotaan badan legislatif ataupun jabatan-jabatan politik. Strategi pembinaan perempuan di dalam kader partai dengan laki-laki kader partai tidak ada dibedakan. Adapun strategi pembinaan yang diberikan dengan cara regular dan insidental. Adapun tindakan program-program yang kurang sistematis membuat kesan yang hanya dianggap formalitas saja. Dewi kemudian menambahkan:

“Kalau kita sih berpendapat penting sekali adanya binaan yang diberikan terhadap kader-kader perempuan ini, biar mereka tidak merasa tertinggal ilmunya. Mereka juga lebih bisa berkomitmen dalam menyuarakan afirmatif. Jadi hasilnya kader-kader ini berkualitas di dalam berpolitik” ujar Dewi.

“Tidak kita bedakan ya mana kader perempuan mana kader yang laki-laki semua kita berikan hak yang sama lmu yang sama ya memang perempuan ada khususnya kan berbeda dengan laki-laki yang bisa dibilang lebih frontal. Ya strategi yang digunakan dalam pembinaan dengan cara regular dan insidental, ada juga yang bersifat sistematis yang berkesan formalitas ya tapi jarang sekali” tanggapan dari Bapak Hamim.

Walaupun pada saat pemilu lalu tidak adanya kader yang dapat masuk ke dalam kepemiluan yang menang dalam mencalonkan diri akan tetapi adanya pelatihan-

pelatihan ini dapat dikatakan menjadi pembekalan pada kader-kader perempuan agar ke depannya dapat lebih maksimal dalam berkontestasi di dalam pencalonan diri, agar dapat ke depannya lebih siap sehingga masyarakat merasa kader perempuan ini memang layak menjadi pemimpin.

“Adanya pelatihan ini memang sangat dibutuhkan bagi kaum perempuan terutama kader di dalam partai ini, tidak menepis kemungkinan bahwa adanya pelatihan ini akan dapat menjadikan perempuan ini unggul di dalam politik dan kita amat harapkan bahwa nanti adanya perempuan yang dapat menang di dalam pemilu tahun depan. Dengan berbagai segi kelayakan sebelumnya pun mereka dapat dikatakan layak, melainkan masyarakat yang menilai mungkin ada yang masih berpikiran laki-laki lebih layak karena berbagai faktor, tapi kita harapkan nanti ini ke depannya perempuan ini dapat menembus dan benar-benar menjadi layak di mata masyarakat dan dapat memenangkan kursi legislatif” ujar Bapak Sekertaris.

E. Penutup

Perlunya memperjuangkan keadilan bagi kaum perempuan dengan cara menerapkan affirmative action untuk memosisikan perempuan secara adil dalam aktivitas politik. Partai Golkar Kabupaten Magetan menurut kajian ini memenuhi kuota keterwakilan sebagai calon anggota dengan kuota perempuan minimal 30%.

Partai Golkar juga memberikan pendidikan dan pelatihan manajemen waktu maupun latihan kepemimpinan tingkat dasar bagi kaum perempuan. Agar ke depannya para kaum perempuan pun diharapkan dapat bersaing dengan kaum laki-laki tanpa membedakan gender.

Organisasi Partai Golkar Kabupaten Magetan terbilang relatif baik dalam menerapkan prinsip affirmative action terhadap kader-kader partainya, dan berhasil memosisikan perempuan secara adil dalam pengambilan keputusan maupun dalam hal kedudukan dalam struktur organisasi. Demikian pula tidak ada batasan-batasan berbias gender

terhadap aktivitas kaum perempuan. Bahkan dalam aktivitas politik kaum perempuan mengambil peran cukup aktif dalam setiap kegiatan yang ada di dalam partai. Demikian juga tidak adanya intimidasi terhadap kaum perempuan dalam menyuarakan aspirasi di dalam partai DPD Golkar di Kabupaten Magetan Jawa Timur. Walaupun sejauh ini masih belum adanya perempuan yang dapat memenangkan kursi legislatif di Kabupaten Magetan, namun partai tetap berupaya membangun *mindset* masyarakat bahwa perempuan mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan laki-laki dalam aktivitas politik sebagai bagian dari pengabdian kepada bangsa dan negara.

Daftar Pustaka

A. Karam. Stockholm: International IDEA: 141-153

Anggaraini, Titi., Di Indonesia, Butuh 44 Tahun Wujudkan Keseimbangan Gender di Parlemen, dalam <https://nasional.sindonews.com/read/349658/12/di-indonesia-butuh-44-tahun-wujudkan-keseimbangan-gender-di-parlemen-1614510177>,

Ardi, Anis Maryuni., (2013). Perempuan Di Legislatif: Advokasi Perempuan Legislatif Bagi Kepentingan Dapil Di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jawa Timur, Jurnal Politik Muda, Vol. 3 No. 3, Agustus-Desember 2014, hal.306, sumber: Gunawan, Imam, Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktek, Jakarta: Bumi Aksara.

Bogdan dan Taylor, (1982). Introduction to Qualitatif Research Methods: Aphenomenologikal approach to the social sciences, New York: John Willy & Sons.

Dahlerup, D. 2005. "Increasing Women's Political Participation: New Trends in Gender Quotas." In Women in Parlia-

ment: Beyond Numbers, ed. J. Ballington, &

Hendrarto. Peran perempuan dalam politik di era demokrasi. <https://jurnal.untidar.ac.id/index.php/komunikasi/article/view/1363/907>

Huntington dan Joan Nelson, (1990). Partisipasi Politik Perempuan di Negara Berkembang, Jakarta: Rineka Cipta.

Jack, C, Ricards., (1999). Longman Dictionary of Language Teaching and Applied Linguistics, Kuala Lumpur, Longman Group.

Jurnal Perempuan, Hambatan Umum Kiprah Perempuan di Politik, dalam <http://www.jurnalperempuan.org/hambatan-umum-perempuan-di-politik.html>

Komposisi Kursi DPRD DKI Jakarta Periode 2019-2024, <https://republika.co.id/berita/nasional-infografis/19/08/30/px1pkd409-komposisi-kursi-dprd-dki-jakarta-periode-20192024>

Konvensi Hak Politik Wanita, New York: United Nations. 1953.

Malik, Yogi Maulana., Analisis Peran Perempuan Dalam Partai Politik Di Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (Dpc Pdi P) Kota Cirebon, <https://media.neliti.com/media/publications/104625-ID-analisis-peran-perempuan-dalam-partai-po.pdf>.

Perempuan Jangan Takut Masuk Ranah Politik, dalam <https://joglosemar.co/2013/11/perempuan-jangan-takut-masuk-ranah-politik.html>

Profil Anggota DPRD DKI Jakarta Periode 2019-2024, <http://statistik.jakarta.go.id/profil-anggota-dprd-dki-jakarta-periode-2019-2024/>

- Rakhmat, Jalaludin., (2000). *Metode Penelitian Komunikatif*, Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Resta Konitiarani, Ahmad Zuber, *Upaya PDIP (Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan) Dalam Memenuhi Kuota Calon Legislatif Perempuan (Studi Kasus Penetapan Caleg Perempuan Pada Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2014 Di Dewan Pimpinan Cabang Pdir (Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan) Kota Surakarta*), <https://jurnal.uns.ac.id/dilema/article/view/11236/pdf> (diakses 24 Januari 2021)
- Simabura, Charles, *Alasan Walikota DKI Jakarta Tidak Dipilih Secara Langsung*, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5cd5441ad8b65/alasan-walikota-dki-jakarta-tidak-dipilih-secara-langsung/>
- Situs Resmi PDIP, AD/ART, <https://pdiperjuangan.id/>
- Subiakto, Henry dan Rachmah Ida (2012). *Komunikasi Politik, Media, dan Demokrasi*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Sukardi, (2005). *Metode Penelitian Pendidikan: kompetensi dan prakteknya*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Suseno, Nuri., (2014). *Perempuan Politisi Dalam Partai Politik Pemilu 2014: Keterwakilan Deskriptif dan Substantif*, dalam *Jurnal Perempuan*, Vol. 19 No. 2.
- Ubaedillah, A., (2015). *Pancasila, Demokrasi & Pencegahan Korupsi*, Jakarta: Prenadamedia Group.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
- West, Richard dan Lynn Turner, (2007). *Introduction Communication Theory*, New York: McGraw-Hill.
- Zakiah., (2010). *Pemberdayaan Perempuan oleh Lajnah Wanita. Jurnal Pengkajian masalah sosial. Keagamaan. XVII. 01 (Januari- Juni)*.
- Zamroni, Muhammad., (2013). *Perempuan dalam Kajian Komunikasi Politik dan Gender*, *Jurnal Dakwah*, Vol. XIV, No.1.